



WALIKOTA SABANG

PROVINSI ACEH

PERATURAN WALI KOTA SABANG NOMOR 1 TAHUN 2020

TENTANG

TATA CARA PENGALOKASIAN DAN PEMBAGIAN ALOKASI DANA GAMPONG DALAM KOTA SABANG TAHUN ANGGARAN 2020

DENGAN RAHMAT ALLAH YANG MAHA KUASA

WALIKOTA SABANG,

Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 96 Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, Wali Kota menetapkan Tata Cara Pengalokasian dan pembagian Alokasi Dana Desa;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Wali Kota tentang Tata Cara Pengalokasian Alokasi Dana Gampong Dalam Kota Sabang Tahun Anggaran 2020;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1965 tentang Pembentukan Kotapraja Sabang dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 7 Drt Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten di Propinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2758);

2. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);

3. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4633);

4. Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2008 tentang Wilayah Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 177, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4925);

5. Undang-Undang ...

5. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah kedua kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5864);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN WALI KOTA TENTANG TATA CARA PENGALOKASIAN DAN PEMBAGIAN ALOKASI DANA GAMPONG DALAM KOTA SABANG TAHUN ANGGARAN 2020.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Wali Kota ini yang dimaksud dengan:

1. Aceh adalah daerah provinsi yang merupakan kesatuan masyarakat hukum yang bersifat istimewa dan diberi kewenangan khusus untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat sesuai dengan peraturan perundang-undangan dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, yang dipimpin oleh seorang gubernur. Pemerintah Daerah adalah Wali Kota sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
2. Kota adalah bagian dari daerah provinsi sebagai suatu kesatuan masyarakat hukum yang diberi kewenangan khusus untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat sesuai dengan peraturan perundang-undangan dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, yang dipimpin oleh seorang walikota.
3. Wali Kota adalah kepala pemerintah daerah kota yang dipilih melalui suatu proses demokratis yang dilakukan berdasarkan asas langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil.
4. Camat adalah pemimpin kecamatan yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Wali Kota melalui Sekretaris Daerah.
5. Pemerintah gampong, adalah keuchik, sekretaris gampong beserta perangkat gampong lainnya yang memiliki tugas dalam penyelenggaraan pemerintah gampong.
6. Pemerintahan gampong adalah keuchik dan tuha peuet yang memiliki tugas dalam penyelenggaraan pemerintahan gampong.
7. Keuchik atau nama lain adalah pimpinan suatu gampong yang memiliki kewenangan untuk menyelenggarakan urusan rumah tangga sendiri,
8. Gampong atau nama lain, adalah kesatuan masyarakat hukum yang berada dibawah mukim dan dipimpin oleh keuchik atau nama lain yang berhak menyelenggarakan urusan rumah tangga sendiri.
9. Tuha peuet gampong atau nama lain adalah unsur pemerintahan gampong yang berfungsi sebagai badan permusyawaratan gampong.

10. Alokasi ...

9. Alokasi Dana Gampong yang selanjutnya disingkat ADG adalah alokasi dana desa yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Kota untuk membiayai Program Pembangunan dalam rangka penyelenggaraan pemerintah gampong.
10. Anggaran Pendapatan dan Belanja Kota yang selanjutnya disingkat APBK adalah anggaran yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Kota.
11. Anggaran Pendapatan dan Belanja Gampong, selanjutnya disebut APBG, adalah rencana keuangan tahunan Pemerintahan Gampong.

BAB II

MAKSUD DAN TUJUAN

Bagian Kesatu

Maksud

Pasal 2

ADG untuk membiayai Program Pembangunan dalam rangka penyelenggaraan pemerintah gampong.

Bagian Kedua

Tujuan

Pasal 3

ADG dialokasikan dengan tujuan untuk:

- a. meningkatkan tugas pokok dan fungsi Keuchik dan perangkat gampong dengan pemberian penghasilan tetap dan tunjangan;
- b. meningkatkan penyelenggaraan pemerintahan gampong, melaksanakan pembangunan dan melakukan pembinaan kemasyarakatan;
- c. menanggulangi kemiskinan dan mengurangi kesenjangan ekonomi;
- d. meningkatkan kemampuan lembaga kemasyarakatan dalam perencanaan, pelaksanaan dan pengendalian;
- e. meningkatkan pengamalan nilai-nilai keagamaan dan sosial budaya;
- f. mendorong peningkatan swadaya gotong royong masyarakat;
- g. meningkatkan ketenteraman dan ketertiban masyarakat;
- h. mendorong peningkatan pendapatan asli gampong dan pendapatan masyarakat;
- i. mewujudkan jaminan sosial ketenagakerjaan (BPJS) bagi keuchik dan perangkat gampong;
- j. mewujudkan kemandirian gampong;
- k. mewujudkan tertib administrasi pengelolaan barang milik gampong; dan
- l. mewujudkan kebersihan dan kesehatan lingkungan gampong.

(m) mewujudkan ...

- m. mewujudkan pendidikan keagamaan bagi murid pengajian Al Qur'an Ba'da Magrib masing-masing gampong.
- n. mewujudkan penerangan lampu jalan umum dikawasan gampong.

BAB III

TATA CARA PENGALOKASIAN

Pasal 4

- (1) Pemerintah Kota mengalokasikan Alokasi Dana Gampong dalam APBK untuk setiap Gampong dalam Kota Tahun Anggaran 2020.
- (2) Pengalokasian Alokasi Dana Gampong sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempertimbangkan jumlah penduduk, angka kemiskinan, luas wilayah, dan tingkat kesulitan geografis serta faktor lainnya.
- (3) Faktor lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terdiri dari bidang keagamaan, anak yatim, disabilitas, pengguna listrik, gas, dana kematian, pengajian ba'da magrib dan penerangan jalan umum.
- (4) Pengalokasian untuk Listrik, Gas dan dana Kematian sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diatur dalam Peraturan Wali Kota.
- (5) Pengalokasian Alokasi Dana Gampong sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran I Peraturan Wali Kota ini.

BAB IV

PENYALURAN ALOKASI DANA GAMPONG

Pasal 5

- (1) Penyaluran Alokasi Dana Gampong dilakukan dengan cara pemindahbukuan dari Rekening Kas Umum Daerah ke Rekening Kas Umum Gampong.
- (2) Pemindahbukuan dari Rekening Kas Umum Daerah ke Rekening Kas Umum Gampong dilakukan setelah persyaratan penyaluran telah dipenuhi.
- (3) Penyaluran Alokasi Dana Gampong dilakukan secara bertahap, dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a. Tahap I pada bulan Maret sebesar 60% (enam puluh perseratus); dan
 - b. Tahap II pada bulan Agustus sebesar 40% (empat puluh perseratus).

(4) Penyaluran ...

- (4) Penyaluran Alokasi Dana Gampong tahap I dilakukan setelah Keuchik menyampaikan:
 - a. Qanun Gampong tentang APBG;
 - b. Keputusan Camat tentang hasil Evaluasi Qanun Gampong tentang APBG;
 - c. Laporan realisasi penggunaan Alokasi Dana Gampong tahun anggaran sebelumnya, paling lambat minggu kedua bulan Februari;
- (5) Penyaluran Alokasi Dana Gampong Tahap II dilakukan setelah Keuchik menyampaikan laporan realisasi penggunaan paling kurang Alokasi Dana Gampong Tahap I telah digunakan sebesar 50% (lima puluh perseratus) kepada Wali Kota melalui Camat.

BAB V

PENGUNAAN ALOKASI DANA GAMPONG

Pasal 6

Alokasi Dana Gampong digunakan untuk :

- a. Bidang penyelenggaraan pemerintahan Gampong
- b. Bidang pelaksanaan pembangunan Gampong
- c. Bidang Pembinaan Kemasyarakatan
- d. Bidang Pemberdayaan Masyarakat
- e. Bidang penanggulangan bencana, keadaan darurat dan mendesak Gampong.

Pasal 7

- (1) Penggunaan Alokasi Dana Gampong bidang penyelenggaraan pemerintahan Gampong sebagaimana di maksud pada pasal 6 huruf a, dianggarkan paling tinggi 30% (tiga puluh perseratus), dari jumlah APBG, digunakan sebagai berikut:
 - a. penghasilan tetap dan tunjangan Keuchik dan Perangkat Gampong;
 - b. operasional Pemerintah Gampong;
 - c. tunjangan dan operasional Tuha Peut; dan
 - d. insentif Aneuk Jurong dan Ketua Pemuda.
- (2) Alokasi Dana Gampong dapat digunakan oleh Keuchik atau Tuha Peut untuk Perjalanan Dinas di bidang Penyelenggaraan Pemerintah Gampong.
- (3) Perjalanan dinas sebagaimana dimaksud dalam ayat (2), mangacu kepada peraturan Wali Kota tentang Mekanisme Pembayaran Biaya Perjalanan Dinas bagi Pejabat Negara, Pegawai Negeri Sipil dan Pegawai tidak tetap dalam lingkungan Pemerintah Kota Sabang dan Dewan Perwakilan Rakyat Kota Sabang.

(4) Penggunaan ...

- (4) Penggunaan Alokasi Dana Gampong untuk penghasilan tetap Keuchik dan Perangkat Gampong sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, menggunakan penghitungan sebagai berikut:
 - a. Alokasi Dana Gampong yang berjumlah kurang dari Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) digunakan paling banyak 60% (enam puluh per seratus);
 - b. Alokasi Dana Gampong yang berjumlah Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) sampai dengan Rp700.000.000,00 (tujuh ratus juta rupiah) digunakan paling banyak 50% (lima puluh per seratus);
 - c. Alokasi Dana Gampong yang berjumlah lebih dari Rp700.000.000,00 (tujuh ratus juta rupiah) sampai dengan Rp900.000.000,00 (sembilan ratus juta rupiah) digunakan paling banyak 40% (empat puluh per seratus);
 - d. Alokasi Dana Gampong yang berjumlah lebih dari Rp900.000.000,00 (sembilan ratus juta rupiah) digunakan paling banyak 30% (tiga puluh per seratus);

Pasal 8

- (1) Besaran penghasilan tetap dan tunjangan bagi Keuchik dan Perangkat Gampong yang bukan berasal dari Pegawai Negeri Sipil hanya diperoleh dari APBG.
- (2) Dalam hal Pegawai Negeri Sipil yang terpilih dan diangkat menjadi Keuchik/Penjabat Keuchik serta Perangkat Gampong hanya berhak mendapatkan Tunjangan dan Penghasilan lainnya yang sah seperti Honorarium yang bersumber dari APBG.
- (3) Penghasilan Keuchik atau Penjabat Keuchik dan Perangkat Gampong sebagaimana dimaksud pada ayat (2) hanya diperoleh dari APBK.
- (4) Tunjangan Prestasi Kerja bagi Penjabat Keuchik dan Sekretaris Gampong dapat dibayarkan melalui instansi induknya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (5) Besaran penghasilan tetap dan tunjangan bagi keuchik dan perangkat gampong yang bukan berasal dari pegawai negeri sipil seperti dimaksud pada ayat (1) dan tunjangan keuchik/penjabat keuchik dan perangkat gampong yang berasal dari pegawai negeri sipil sebagaimana maksud pada ayat (2) ditetapkan sebagaimana tercantum dalam lampiran II dan III Peraturan Wali Kota ini.

Pasal 9

- (1) Besaran tunjangan Tuha Peut sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) huruf c tercantum dalam Lampiran IV Peraturan Wali Kota ini.
- (2) Operasional Tuha Peut sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) huruf c adalah bantuan uang untuk membiayai tugas dan fungsi Tuha Peut sebagai lembaga pengawasan Pemerintahan Gampong dan dapat membiayai pelaksanaan pemilihan Keuchik.
- (3) Besaran Alokasi dana pemilihan Keuchik sebagaimana tercantum dalam Lampiran V Peraturan Wali Kota ini.

Pasal 10

Insentif bagi Aneuk Jurong dan Ketua Pemuda sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) huruf d adalah bantuan uang untuk operasional dalam rangka membantu pelaksanaan tugas pelayanan pemerintahan, perencanaan pembangunan, ketentraman dan ketertiban, serta pemberdayaan masyarakat Gampong.

Pasal 11

- (1) Dalam rangka membantu tugas umum Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan Gampong untuk mendukung terselenggaranya fungsi pemerintahan gampong, Keuchik dapat mengangkat Pembantu Tugas Umum Gampong/Operator Profil Gampong/Desa/Kelurahan (PRODESKEL), Sistem Keuangan Desa (SISKEUDES).
- (2) Besaran Honorarium Pembantu Tugas Umum/Operator Profil Desa/Kelurahan (PRODESKEL), Sistem Keuangan Desa (SISKEUDES), sebagaimana tercantum dalam Lampiran VI Peraturan Wali Kota ini.

Pasal 12

- (1) Besaran insentif bagi Imam Masjid, Imam Meunasah, Bilal Masjid, Bilal Meunasah dan Guru Pengajian sebagaimana tercantum dalam Lampiran VII Peraturan Wali Kota ini.
- (2) Besaran insentif Muazin masjid dan muazin meunasah ditetapkan dengan Keputusan Keuchik.

Pasal 13

- (1) Keuchik melaksanakan kegiatan pengajian Al Qur'an Ba'da Magrib di gampong dengan menunjuk tengku sebagai guru pengajian.

(2) Pengajian ...

- (2) Pengajian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan setelah shalat Magrib pada Mesjid dan meunasah di Gampong dalam Kota Sabang.
- (3) Guru pengajian sebagai mana tersebut pada ayat (1) dapat diberikan Honorarium dengan besaran sebagaimana tercantum dalam Lampiran VIII Peraturan Wali Kota ini.

Pasal 14

- (1) Pemerintah Kota mengalokasikan dana untuk gampong setiap tahun untuk melakukan pembayaran listrik penerangan jalan umum.
- (2) Pembayaran sebagaimana tersebut pada ayat (1) dilakukan gampong selama 5 (lima) bulan, terhitung mulai bulan Agustus sampai dengan Desember tahun berjalan.
- (3) Besaran pembayaran listrik sebagaimana di maksud pada ayat (2), tercantum dalam Lampiran IX Peraturan Wali Kota ini.

Pasal 15

Bidang Pelaksanaan Pembangunan Gampong sebagai mana dimaksud dalam pasal 6 huruf, b meliputi:

- a. pendidikan;
- b. kesehatan;
- c. pekerjaan umum dan penataan ruang;
- d. kawasan pemukiman;
- e. kehutanan dan lingkungan hidup;
- f. Perhubungan, komunikasi dan Informatika;
- g. Energi dan sumberdaya mineral; dan
- h. Parawisata.

Pasal 16

- (1) Bidang Pembinaan Kemasyarakatan Gampong sebagai mana dimaksud dalam pasal 6 huruf, c meliputi:
 - a. pembinaan kerukunan masyarakat gampong;
 - b. penyelenggaraan keamanan, ketentraman dan ketertiban;
 - c. pembinaan PKK Gampong;
 - d. pembinaan kerukunan antar umat beragama;
 - e. pengelolaan dan pembinaan kader Posyandu dan BKB;
 - f. pembinaan lembaga adat;
 - g. melestarikan dan mengembangkan gotong royong masyarakat gampong;

h. pembinaan ...

- h. pembinaan kesenian dan sosial budaya masyarakat;
 - i. memelihara perdamaian, menangani konflik dan melakukan mediasi di gampong;
 - j. kegiatan pembinaan kemasyarakatan gampong lainnya yang sesuai dengan kewenangan gampong diputuskan dalam musyawarah gampong.
- (2) Besaran Alokasi Dana pengelolaan dan pembinaan PKK Gampong sebagaimana tercantum dalam Lampiran X Peraturan Wali Kota ini.
 - (3) Besaran Alokasi Dana pengelolaan dan pembinaan Posyandu dan BKB sebagaimana tercantum dalam Lampiran XI Peraturan Wali Kota ini.

Pasal 17

- (1) Bidang Pemberdayaan Masyarakat Gampong sebagai mana dimaksud pada pasal 6 huruf c, dipergunakan untuk:
 - a. pengorganisasian melalui pembentukan dan fasilitasi paralegal untuk memberikan bantuan hukum kepada warga masyarakat gampong;
 - b. penyelenggaraan promosi kesehatan dan gerakan hidup bersih dan sehat;
 - c. dukungan terhadap kegiatan gampong dan masyarakat pengelolaan hutan gampong dan hutan kemasyarakatan;
 - d. pelatihan teknologi tepat guna;
 - e. pendidikan, pelatihan, dan penyuluhan bagi Keuchik, perangkat Gampong, dan Badan Pemusyawaratan Gampong;
 - f. peningkatan kapasitas kelompok masyarakat melalui:
 - 1. kelompok usaha ekonomi produktif;
 - 2. kelompok perempuan;
 - 3. kelompok tani;
 - 4. kelompok masyarakat miskin;
 - 5. kelompok nelayan;
 - 6. kelompok pengrajin;
 - 7. kelompok pemerhati dan perlindungan anak;
 - 8. kelompok pemuda; dan
 - 9. kelompok lain sesuai kondisi gampong.
- (2) Besaran bantuan dana bagi Anak Yatim sebagaimana tercantum dalam Lampiran XII Peraturan Wali Kota ini.
- (3) Besaran bantuan disabilitas sebagaimana tercantum dalam Lampiran XIII Peraturan Wali Kota ini.
- (4) Besaran Alokasi Dana Gampong unang duka/kematian sebagaimana tercantum dalam Lampiran XIV Peraturan Wali Kota ini.

(5) Besaran ...

- (5) Besaran dana jaminan sosial ketenagakerjaan (BPJS) sebagaimana tercantum dalam Lampiran XV Peraturan Wali Kota ini.
- (6) Alokasi Dana Gampong dapat digunakan oleh Keuchik atau Tuha Peut atau yang mewakili untuk bantuan transportasi dan uang harian dalam rangka kegiatan Adat Istiadat di bidang pemberdayaan masyarakat gampong.
- (7) Bantuan transportasi dan uang harian sebagaimana dimaksud dalam ayat (5), mengacu kepada peraturan Wali Kota Sabang tentang mekanisme pembayaran biaya perjalanan dinas pejabat Negara, Pegawai Negeri Sipil dan Pegawai tidak tetap dalam lingkungan Pemerintah Kota Sabang dan Dewan Perwakilan Rakyat Kota Sabang.
- (8) Kegiatan pemberdayaan masyarakat gampong lainnya yang sesuai dengan kewenangan gampong diputuskan dalam musyawarah gampong.

Pasal 18

- (1) Penggunaan Alokasi Dana Gampong bidang penanggulangan bencana, keadaan darurat dan mendesak Gampong sebagaimana di maksud pada pasal 6 huruf e, digunakan sebagai berikut:
 - a. bukan merupakan kegiatan normal dari aktivitas pemerintah Gampong dan tidak dapat diprediksikan sebelumnya;
 - b. tidak diharapkan terjadi berulang; dan
 - c. berada di luar kendali pemerintah Gampong.
- (2) kegiatan pada bidang penanggulangan bencana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan upaya tanggap darurat akibat terjadinya bencana alam dan bencana sosial.
- (3) Kegiatan pada bidang keadaan darurat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan upaya penanggulangan keadaan darurat karena adanya kerusakan dan/atau terancamnya penyelesaian pembangunan sarana dan prasarana akibat kenaikan harga yang menyebabkan terganggunya pelayanan dasar masyarakat.
- (4) Kegiatan pada bidang keadaan mendesak merupakan upaya pemenuhan kebutuhan primer dan pelayanan dasar masyarakat miskin yang mengalami kedaruratan.

Pasal 19

- (1) Penggunaan Alokasi Dana Gampong yang tertuang dalam program dan kegiatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6, menjadi prioritas kegiatan, APBG yang disepakati dan diputuskan melalui musyawarah Gampong.
- (2) Hasil keputusan musyawarah Gampong sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus menjadi acuan bagi penyusunan RKPG dan APBG.
- (3) RKPG dan APBG sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dalam Qanun Gampong.
- (4) Keuchik bertanggung jawab atas penggunaan Alokasi Dana Gampong.

BAB VI

SANKSI

Bagian Kesatu

Penundaan Penyaluran

Pasal 20

- (1) Wali Kota menunda penyaluran Alokasi Dana Gampong, dalam hal:
 - a. Wali Kota belum menerima dokumen sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (4);
 - b. terdapat sisa Alokasi Dana Gampong di RKG tahun anggaran sebelumnya lebih dari 30% (tiga puluh perseratus);
 - c. terdapat usulan dari aparat pengawas fungsional daerah.
- (2) Penundaan penyaluran Alokasi Dana Gampong sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dilakukan terhadap penyaluran Alokasi Dana Gampong tahap I tahun anggaran berjalan sebesar sisa Alokasi Dana Gampong di RKG tahun anggaran sebelumnya.
- (3) Dalam hal sisa Alokasi Dana Gampong di RKG tahun anggaran sebelumnya lebih besar dari jumlah Alokasi Dana Gampong yang akan disalurkan pada tahap I, penyaluran Alokasi Dana Gampong Tahap I tidak dilakukan.
- (4) Penundaan penyaluran Alokasi Dana Gampong sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dilakukan sampai dengan sisa Alokasi Dana Gampong di RKG tahun anggaran sebelumnya telah direalisasikan penggunaannya, sehingga sisa Alokasi Dana Gampong di RKG menjadi paling tinggi sebesar 30% (tiga puluh perseratus) dari anggaran Alokasi Dana Gampong tahun anggaran sebelumnya.

(5) Dalam ...

- (5) Dalam hal sampai bulan Juli tahun anggaran berjalan sisa Alokasi Dana Gampong di RKG tahun anggaran sebelumnya masih lebih besar dari 30% (tiga puluh perseratus), penyaluran Alokasi Dana Gampong yang ditunda sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disalurkan bersamaan dengan penyaluran Alokasi Dana Gampong tahap II.

Pasal 21

- (1) Wali Kota menyalurkan kembali Alokasi Dana Gampong yang ditunda dalam hal:
- a. Qanun Gampong tentang APBG dan laporan realisasi penggunaan Alokasi Dana Gampong tahun anggaran sebelumnya dari Keuchik telah diterima;
 - b. terdapat usulan dari aparat pengawas fungsional Daerah.
 - c. Dalam hal penundaan penyaluran Alokasi Dana Gampong sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (1) berlangsung sampai dengan bulan November tahun anggaran berjalan, Alokasi Dana Gampong tidak dapat disalurkan lagi ke RKG dan menjadi sisa Alokasi Dana Gampong di RKUD.
 - d. Wali Kota memberitahukan kepada Keuchik yang bersangkutan mengenai Alokasi Dana Gampong yang ditunda penyalurannya sebagaimana dimaksud pada Pasal 20 ayat (3) selambat-lambatnya akhir bulan November tahun anggaran berjalan dan agar dianggarkan kembali dalam rancangan APBG tahun anggaran berikutnya.
 - e. Wali Kota menganggarkan kembali sisa Alokasi Dana Gampong di RKUD dalam rancangan APBK tahun anggaran berikutnya sebagai dasar penyaluran kembali Alokasi Dana Gampong dari RKUD ke RKG.
 - f. Dalam hal rancangan APBK tahun berikutnya sebagaimana dimaksud pada Pasal 20 ayat (5) telah ditetapkan, sisa Alokasi Dana Gampong di RKUD tersebut dapat disalurkan mendahului penetapan Qanun tentang perubahan APBK dengan cara menetapkan Peraturan Wali Kota tentang perubahan penjabaran APBK dan memberitahukan kepada Ketua DPRK.

Bagian Kedua

Pemotongan Penyaluran Dana Gampong

Pasal 22

- (1) Wali Kota melakukan pemotongan penyaluran Alokasi Dana Gampong dalam hal setelah dikenakan sanksi penundaan penyaluran Alokasi Dana Gampong sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (1) huruf b, masih terdapat sisa Alokasi Dana Gampong di RKG lebih dari 30% (tiga puluh perseratus).

(2) Pemotongan ...

- (2) Pemotongan penyaluran Alokasi Dana Gampong sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan pada penyaluran Alokasi Dana Gampong tahun anggaran berikutnya.

BAB VII

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 23

Peraturan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Wali Kota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Sabang.

Ditetapkan di Sabang
pada tanggal 3 Februari 2020

WALI KOTA SABANG,

ttd

NAZARUDDIN

Diundangkan di Sabang
pada tanggal 3 Februari 2020

SEKRETARIS DAERAH KOTA SABANG,

ttd

ZAKARIA

BERITA DAERAH KOTA SABANG TAHUN 2020 NOMOR 1

BERDASARKAN ALOKASI DANA MERATA, PROPORSIONAL DAN KEAGAMAAN, ANAK YATIM, DISABILITAS, LISTRIK DAN GAS 3 Kg, BANTUAN KEMATIAN/DUKA, SEUMUBET BA'DA MAGRIB dan PJU

ALOKASI DANA KOTA	AD GAMPONG	39,092,713,000
PEMBAGIAN DANA MERATA	75 %	14,477,844,684
PEMBAGIAN DANA PROPORSIONAL	25 %	4,825,948,228
PEMBAGIAN DANA KEAGAMAAN		1,950,600,000
PEMBAGIAN DANA ANAK YATIM		2,039,400,000
PEMBAGIAN DANA DISABILITAS		516,200,000
PEMBAGIAN DANA BANTUAN SUBSIDI LISTRIK		8,025,384,050
PEMBAGIAN DANA BANTUAN GAS / LPG 3 Kg		2,911,475,600
PEMBAGIAN DANA BANTUAN DANA KEMATIAN / DUKA		1,645,000,000
PEMBAGIAN DANA BANTUAN SEUMUBET BA'DA ISYA		480,000,000
PEMBAGIAN DANA PENERANGAN JALAN UMUM		2,220,860,438
JUMLAH GAMPONG		18

NO.	KECAMATAN/ GAMPONG	ALOKASI DANA GAMPONG												KEPENDUDUKAN		GEOGRAFIS		KEMISKINAN		KETERJANGKAUAN	
		ALOKASI MERATA	ALOKASI PROPORSIONAL	KEAGAMAAN	ANAK YATIM	DISABILITAS	LISTRIK	GAS	DANA KEMATIAN	DANA SEUMUBET BA'DA MAGRIB	DANA PJU	ALOKASI TOTAL	BOBOT GAMPONG	JUMLAH PENDUDUK	BOBOT	LUAS WILAYAH	BOBOT	JUMLAH PENDUDUK MISKIN	BOBOT	JARAK	BOBOT
	SUKAKARYA																				
1	IBOIH	804,324,705	338,800,911	68,100,000	69,300,000	18,800,000	332,900,000	119,720,000	55,000,000	30,000,000	91,897,382	1,928,842,998	0.070	1,300	0.031	34.08	0.223	83	0.025	27	0.144
2	BATEE SHOK	804,324,705	300,120,545	139,500,000	148,500,000	23,400,000	386,225,125	166,853,600	60,000,000	42,000,000	91,207,761	2,162,131,736	0.062	1,682	0.040	14.09	0.092	209	0.063	15	0.080
3	PAYA SEUNARA	804,324,705	421,040,198	169,200,000	181,500,000	32,100,000	659,629,000	282,875,400	100,000,000	36,000,000	151,733,061	2,838,402,363	0.087	3,061	0.073	7.04	0.046	419	0.125	10	0.053
4	KRUENG RAYA	804,324,705	268,428,926	111,000,000	132,000,000	39,000,000	481,138,075	195,520,800	65,000,000	36,000,000	102,557,172	2,234,969,678	0.056	2,082	0.049	11.97	0.078	213	0.064	7	0.037
5	ANEUK LAOT	804,324,705	184,363,617	94,500,000	69,300,000	12,100,000	262,059,700	98,580,400	55,000,000	30,000,000	92,924,478	1,703,152,900	0.038	1,340	0.032	5.60	0.037	182	0.055	3	0.016
6	KUTA TIMU	804,324,705	251,852,529	127,500,000	105,600,000	32,800,000	489,332,950	200,801,600	130,000,000	30,000,000	60,945,111	2,233,156,894	0.052	2,422	0.058	1.96	0.013	272	0.081	1	0.005
7	KUTA BARAT	804,324,705	287,010,346	150,600,000	198,000,000	54,600,000	727,613,675	338,323,800	130,000,000	18,000,000	174,431,882	2,882,904,408	0.059	3,910	0.093	1.10	0.007	249	0.075	1	0.005
8	KUTA ATEUH	804,324,705	177,231,073	148,500,000	148,500,000	50,400,000	644,231,975	166,099,200	115,000,000	18,000,000	174,776,693	2,447,063,646	0.037	4,239	0.101	0.65	0.004	42	0.013	1	0.005
	J U M L A H	6,434,597,637	2,228,848,146	1,008,900,000	1,052,700,000	263,200,000	3,983,130,500	1,568,774,800	710,000,000	240,000,000	940,473,540	18,430,624,624	0.462	20,036		76.49		1,669			
	SUKAJAYA																				
1	PAYA	804,324,705	295,487,700	49,500,000	26,400,000	19,100,000	165,086,500	81,983,600	50,000,000	18,000,000	61,979,543	1,571,862,048	0.061	757	0.018	17.47	0.114	131	0.039	27	0.144
2	KEUNEUKAI	804,324,705	255,960,586	84,600,000	85,800,000	8,100,000	234,384,700	117,817,600	80,000,000	18,000,000	75,735,293	1,764,722,884	0.053	1,060	0.025	7.09	0.046	119	0.036	25	0.133
3	BEURAWANG	804,324,705	168,858,776	33,000,000	9,900,000	12,200,000	120,077,725	54,070,800	45,000,000	12,000,000	31,027,272	1,290,459,278	0.035	396	0.009	5.85	0.038	59	0.018	20	0.106
4	JABOI	804,324,705	239,748,796	54,900,000	29,700,000	15,900,000	186,260,950	88,773,200	50,000,000	12,000,000	62,661,828	1,544,269,479	0.050	882	0.021	6.12	0.040	169	0.051	18	0.096
5	BALOHAN	804,324,705	516,024,688	127,500,000	138,600,000	36,500,000	787,622,300	269,296,200	150,000,000	42,000,000	172,707,828	3,044,575,721	0.107	3,723	0.088	9.98	0.065	519	0.155	11	0.059
6	COT ABEUK	804,324,705	129,573,922	45,000,000	62,700,000	19,500,000	206,500,600	101,220,800	50,000,000	18,000,000	66,447,411	1,503,267,438	0.027	1,057	0.025	4.46	0.029	57	0.017	9	0.048
7	COT BA' U	804,324,705	506,314,840	225,300,000	372,900,000	70,900,000	1,259,663,500	284,384,200	220,000,000	48,000,000	386,615,243	4,178,402,487	0.105	7,768	0.184	7.49	0.049	364	0.109	1	0.005
8	ANOE ITAM	804,324,705	152,629,051	90,000,000	46,200,000	24,300,000	196,420,750	92,545,200	50,000,000	18,000,000	79,858,350	1,554,278,056	0.032	849	0.020	12.71	0.083	82	0.025	7	0.037
9	UJOENG KAREUNG	804,324,705	82,532,909	28,500,000	23,100,000	7,600,000	161,236,600	68,781,600	60,000,000	6,000,000	78,823,918	1,320,899,731	0.017	722	0.017	1.52	0.010	56	0.017	4	0.021
10	IE MEULEE	804,324,705	249,968,815	203,400,000	191,400,000	38,900,000	724,999,925	183,827,600	180,000,000	48,000,000	264,530,211	2,889,351,255	0.052	4,853	0.115	3.82	0.025	114	0.034	1	0.005
	J U M L A H	8,043,247,047	2,597,100,082	941,700,000	986,700,000	253,000,000	4,042,253,550	1,342,700,800	935,000,000	240,000,000	1,280,386,897	20,662,088,376	0.538	22,067		76.51		1,670			
	T O T A L	14,477,844,684	4,825,948,228	1,950,600,000	2,039,400,000	516,200,000	8,025,384,050	2,911,475,600	1,645,000,000	480,000,000	2,220,860,438	39,092,713,000	1.000	42,103.00	1.000	153.00	1.000	3,339.00	1.000	188	1.000

VARIABEL	BOBOT	ANGKA BOBOT
KEMISKINAN	4	0.40
KEPENDUDUKAN	3	0.30
KETERJANGKAUAN	2	0.20
GEOGRAFIS	1	0.10
J U M L A H	10	1.00

WALI KOTA SABANG,

ttd

NAZARUDDIN

LAMPIRAN II
 PERATURAN WALI KOTA SABANG
 NOMOR 1 TAHUN 2020
 TENTANG
 TATA CARA PENGALOKASIAN DAN
 PEMBAGIAN ALOKASI DANA GAMPONG
 TAHUN ANGGARAN 2020

BESARAN PENGHASILAN TETAP DAN TUNJANGAN KEUCHIK DAN PERANGKAT
 GAMPONG YANG BUKAN PEGAWAI NEGERI SIPIL

NO	URAIAN	SATUAN	BIAYA (Rp)	KETERANGAN
1	2	3	4	5
1	PENGHASILAN TETAP KEUCHIK DAN PERANGKAT GAMPONG YANG BUKAN BERASAL DARI PNS			
	a. Keuchik	Orang/bulan	3,000,000	
	b. Kepala Urusan	Orang/bulan	2,022,200	
	c. Kepala Seksi	Orang/bulan	2,022,200	
	d. Ulee Jurong	Orang/bulan	750,000	
2	TUNJANGAN KEUCHIK DAN PERANGKAT GAMPONG YANG BUKAN BERASAL DARI PNS			
	a. Keuchik	Orang/bulan	1,000,000	Honorarium di bayar selama 12 (dua belas) bulan
	b. Sekretaris Gampong	Orang/bulan	550,000	
	c. Kepala Urusan	Orang/bulan	500,000	
	d. Kepala Seksi	Orang/bulan	500,000	
	e. Ulee Jurong	Orang/bulan	lihat catatan	

Catatan:
 Tunjangan Ulee Jurong yang bukan berasal dari PNS dapat diberikan dan disesuaikan dengan kemampuan keuangan Gampong

WALI KOTA SABANG,

 ttd

 NAZARUDDIN

LAMPIRAN III
 PERATURAN WALI KOTA SABANG
 NOMOR 1 TAHUN 2020
 TENTANG
 TATA CARA PENGALOKASIAN DAN
 PEMBAGIAN ALOKASI DANA GAMPONG
 TAHUN ANGGARAN 2020

BESARAN PENGHASILAN TETAP, TUNJANGAN DAN HONORARIUM KEUCHIK DAN
 PERANGKAT GAMPONG YANG BERASAL DARI PEGAWAI NEGERI SIPIL

NO	URAIAN	SATUAN	BIAYA (Rp)	KETERANGAN
1	2	3	4	5
1	PENGHASILAN TETAP KEUCHIK/Pj. KEUCHIK DAN PERANGKAT GAMPONG YANG BERASAL DARI PEGAWAI NEGERI SIPIL			
	a. Keuchik	Orang/bulan	-	
	b. Sekretaris Gampong	Orang/bulan	-	
	c. Kepala Urusan	Orang/bulan	-	
	d. Kepala Seksi	Orang/bulan	-	
	e. Ulee Jurong	Orang/bulan	-	
2	TUNJANGAN KEUCHIK/Pj. KEUCHIK DAN PERANGKAT GAMPONG YANG BERASAL DARI PEGAWAI NEGERI SIPIL			
	a. Keuchik	Orang/bulan	3,000,000	
	b. Sekretaris Gampong	Orang/bulan	2,224,240	
	c. Kepala Urusan	Orang/bulan	2,022,200	
	d. Kepala Seksi	Orang/bulan	2,022,200	
	e. Ulee Jurong	Orang/bulan	750,000	
	Honorarium Monitoring Pelaksanaan APBG*)	Orang/bulan	1,000,000	

Catatan: *)
 diberikan kepada Keuchik/Pejabat Keuchik
 selaku penanggungjawab APBG

WALI KOTA SABANG,

 ttd

 NAZARUDDIN

LAMPIRAN IV
PERATURAN WALI KOTA SABANG
NOMOR 1 TAHUN 2020
TENTANG
TATA CARA PENGALOKASIAN DAN
PEMBAGIAN ALOKASI DANA GAMPONG
TAHUN ANGGARAN 2020

BESARAN TUNJANGAN TUHA PEUT

NO	URAIAN	SATUAN	BIAYA (Rp)	KETERANGAN
1	2	3	4	5
	TUNJANGAN TUHA PEUT			
	a. Ketua	Orang/bulan	850,000	Honorarium dibayar selama 12 (dua belas) bulan
	b. Anggota	Orang/bulan	650,000	
	c. Staf Sekretariat	Orang/bulan	550,000	

WALI KOTA SABANG,

ttd

NAZARUDDIN

LAMPIRAN V
PERATURAN WALI KOTA SABANG
NOMOR 1 TAHUN 2020
TENTANG
TATA CARA PENGALOKASIAN DAN
PEMBAGIAN ALOKASI DANA
GAMPONG
TAHUN ANGGARAN 2020

BESARAN ALOKASI DANA PEMILIHAN KEUCHIK DALAM KOTA SABANG

NO	GAMPONG	ALOKASI DANA	KETERANGAN
1	2	3	4
	Ujung Kareung	20,000,000	

WALI KOTA SABANG,

ttd

NAZARUDDIN

LAMPIRAN VI
PERATURAN WALI KOTA SABANG
NOMOR 1 TAHUN 2020
TENTANG
TATA CARA PENGALOKASIAN DAN
PEMBAGIAN ALOKASI DANA GAMPONG
TAHUN ANGGARAN 2020

BESARAN ALOKASI DANA PEMBANTU TUGAS UMUM/OPERATOR
PROFIL DESA atau GAMPONG/KELURAHAN (PRODESKEL) dan
SISTEM KEUANGAN DESA/GAMPONG (SISKEUDES)
DALAM KOTA SABANG

NO	GAMPONG	ALOKASI DANA	KETERANGAN
1	2	3	4
1 2	Sistem Keuangan Desa/Gampong (SISKEUDES) Operator Prifil Desa/Kelurahan/Gampong (PRODESKEL)	700,000 500,000	Honorarium di bayar selama 12 (dua belas) bln

WALI KOTA SABANG,

ttd

NAZARUDDIN

LAMPIRAN VII
PERATURAN WALI KOTA SABANG
NOMOR 1 TAHUN 2020
TENTANG
TATA CARA PENGALOKASIAN DAN
PEMBAGIAN ALOKASI DANA GAMPONG
TAHUN ANGGARAN 2020

BESARAN INSENTIF IMAM MESJID, IMAM MEUNASAH,
BILAL MESJID, BILAL MEUNASAH DAN GURU
PENGAJIAN DALAM KOTA SABANG

NO	NAMA PENGURUS	HONORARIUM PER-ORANG PER-BULAN	KETERANGAN
1	2	3	4
1	Imeum Mesjid	500,000	Honorarium dibayar selama 12 (dua belas) bulan
2	Bilal Mesjid	300,000	
3	Imeum Meunasah	350,000	
4	Bilal Meunasah	250,000	
5	Guru Pengajian	300,000	

WALI KOTA SABANG,

ttd

NAZARUDDIN

LAMPIRAN X
PERATURAN WALI KOTA SABANG
NOMOR 1 TAHUN 2020
TENTANG
TATA CARA PENGALOKASIAN DAN
PEMBAGIAN ALOKASI DANA GAMPONG
TAHUN ANGGARAN 2020

BESARAN ALOKASI DANA PENGELOLAAN DAN PEMBINAAN PKK
GAMPONG DALAM KOTA SABANG

NO	GAMPONG	ALOKASI DANA	KETERANGAN
1	2	3	4
1	Iboih	15,000,000	
2	Batee Shok	15,000,000	
3	Paya Seunara	15,000,000	
4	Krueng Raya	15,000,000	
5	Aneuk Laot	15,000,000	
6	Kuta Timu	15,000,000	
7	Kuta Barat	15,000,000	
8	Kuta Ateuh	15,000,000	
9	Paya	15,000,000	
10	Keuneukai	15,000,000	
11	Beurawang	15,000,000	
12	Jaboi	15,000,000	
13	Balohan	15,000,000	
14	Cot Abeuk	15,000,000	
15	Cot Ba'U	15,000,000	
16	Anoi Itam	15,000,000	
17	Ujong Kareung	15,000,000	
18	Iee Meulee	15,000,000	

WALI KOTA SABANG,

ttd

NAZARUDDIN

LAMPIRAN XI
PERATURAN WALI KOTA SABANG
NOMOR 1 TAHUN 2020
TENTANG
TATA CARA PENGALOKASIAN DAN
PEMBAGIAN ALOKASI DANA GAMPONG
TAHUN ANGGARAN 2020

BESARAN ALOKASI DANA PENGELOLAAN DAN PEMBINAAN POSYANDU/BKB
DALAM KOTA SABANG

NO	GAMPONG	ALOKASI DANA	KETERANGAN
1	2	3	4
1	Iboih	10,000,000	
2	Batee Shok	10,000,000	
3	Paya Seunara	10,000,000	
4	Krueng Raya	10,000,000	
5	Aneuk Laot	10,000,000	
6	Kuta Timu	10,000,000	
7	Kuta Barat	10,000,000	
8	Kuta Ateuh	10,000,000	
9	Paya	10,000,000	
10	Keuneukai	10,000,000	
11	Beurawang	10,000,000	
12	Jaboi	10,000,000	
13	Balohan	10,000,000	
14	Cot Abeuk	10,000,000	
15	Cot Ba'U	10,000,000	
16	Anoi Itam	10,000,000	
17	Ujong Kareung	10,000,000	
18	Iee Meulee	10,000,000	

WALI KOTA SABANG,

ttd

NAZARUDDIN

LAMPIRAN XII
 PERATURAN WALI KOTA SABANG
 NOMOR 1 TAHUN 2020
 TENTANG
 TATA CARA PENGALOKASIAN DAN
 PEMBAGIAN ALOKASI DANA GAMPONG
 TAHUN ANGGARAN 2020

BESARAN DANA BANTUAN ANAK YATIM
 DALAM KOTA SABANG

NO	KECAMATAN/ GAMPONG	ANAK YATIM JUMLAH (Rp)				JUMLAH SELURUHNYA
SUKAKARYA						
1	Iboih	21 x	3,300,000 x	1 Tahun	69,300,000	69,300,000
2	Batee Shok	45 x	3,300,000 x	1 Tahun	148,500,000	148,500,000
3	Paya Seunara	55 x	3,300,000 x	1 Tahun	181,500,000	181,500,000
4	Krueng Raya	40 x	3,300,000 x	1 Tahun	132,000,000	132,000,000
5	Aneuk Laot	21 x	3,300,000 x	1 Tahun	69,300,000	69,300,000
6	Kuta Timu	32 x	3,300,000 x	1 Tahun	105,600,000	105,600,000
7	Kuta Barat	60 x	3,300,000 x	1 Tahun	198,000,000	198,000,000
8	Kuta Ateuh	45 x	3,300,000 x	1 Tahun	148,500,000	148,500,000
JUMLAH		319			1,052,700,000	1,052,700,000
SUKAJAYA						
1	Paya	8 x	3,300,000 x	1 Tahun	26,400,000	26,400,000
2	Keuneukai	26 x	3,300,000 x	1 Tahun	85,800,000	85,800,000
3	Beurawang	3 x	3,300,000 x	1 Tahun	9,900,000	9,900,000
4	Jaboi	9 x	3,300,000 x	1 Tahun	29,700,000	29,700,000
5	Balohan	42 x	3,300,000 x	1 Tahun	138,600,000	138,600,000
6	Cot Abeuk	19 x	3,300,000 x	1 Tahun	62,700,000	62,700,000
7	Cot Ba'U	113 x	3,300,000 x	1 Tahun	372,900,000	372,900,000
8	Anoi Itam	14 x	3,300,000 x	1 Tahun	46,200,000	46,200,000
9	Ujong Kareung	7 x	3,300,000 x	1 Tahun	23,100,000	23,100,000
10	Iee Meulee	58 x	3,300,000 x	1 Tahun	191,400,000	191,400,000
JUMLAH		299			986,700,000	986,700,000
TOTAL		618			2,039,400,000	2,039,400,000

WALI KOTA SABANG,

ttd

NAZARUDDIN

LAMPIRAN XIII
 PERATURAN WALI KOTA SABANG
 NOMOR 1 TAHUN 2020
 TENTANG
 TATA CARA PENGALOKASIAN DAN PEMBAGIAN
 ALOKASI DANA GAMPONG
 TAHUN ANGGARAN 2020

BESARAN DANA BANTUAN DISABILITAS
 DALAM KOTA SABANG

NO	KECAMATAN/ GAMPONG																
		BERAT				SEDANG				RINGAN							
		JUMLAH (Rp)				JUMLAH (Rp)				JUMLAH (Rp)							
SUKAKARYA																	
1	Iboih	0 x	3,100,000	x	1 Tahun	-	14 x	1,000,000	x	1 Tahun	14,000,000	6 x	800,000	x	1 Tahun	4,800,000	18,800,000
2	Batee Shok	2 x	3,100,000	x	1 Tahun	6,200,000	14 x	1,000,000	x	1 Tahun	14,000,000	4 x	800,000	x	1 Tahun	3,200,000	23,400,000
3	Paya Seunara	3 x	3,100,000	x	1 Tahun	9,300,000	18 x	1,000,000	x	1 Tahun	18,000,000	6 x	800,000	x	1 Tahun	4,800,000	32,100,000
4	Krueng Raya	4 x	3,100,000	x	1 Tahun	12,400,000	25 x	1,000,000	x	1 Tahun	25,000,000	2 x	800,000	x	1 Tahun	1,600,000	39,000,000
5	Aneuk Laot	1 x	3,100,000	x	1 Tahun	3,100,000	9 x	1,000,000	x	1 Tahun	9,000,000	0 x	800,000	x	1 Tahun	-	12,100,000
6	Kuta Timu	2 x	3,100,000	x	1 Tahun	6,200,000	17 x	1,000,000	x	1 Tahun	17,000,000	12 x	800,000	x	1 Tahun	9,600,000	32,800,000
7	Kuta Barat	2 x	3,100,000	x	1 Tahun	6,200,000	46 x	1,000,000	x	1 Tahun	46,000,000	3 x	800,000	x	1 Tahun	2,400,000	54,600,000
8	Kuta Ateuh	6 x	3,100,000	x	1 Tahun	18,600,000	19 x	1,000,000	x	1 Tahun	19,000,000	16 x	800,000	x	1 Tahun	12,800,000	50,400,000
JUMLAH		20	62,000,000				162	162,000,000				49	39,200,000				263,200,000
SUKAJAYA																	
1	Paya	1 x	3,100,000	x	1 Tahun	3,100,000	16 x	1,000,000	x	1 Tahun	16,000,000	0 x	800,000	x	1 Tahun	-	19,100,000
2	Keuneukai	1 x	3,100,000	x	1 Tahun	3,100,000	5 x	1,000,000	x	1 Tahun	5,000,000	0 x	800,000	x	1 Tahun	-	8,100,000
3	Beurawang	0 x	3,100,000	x	1 Tahun	-	9 x	1,000,000	x	1 Tahun	9,000,000	4 x	800,000	x	1 Tahun	3,200,000	12,200,000
4	Jaboi	3 x	3,100,000	x	1 Tahun	9,300,000	5 x	1,000,000	x	1 Tahun	5,000,000	2 x	800,000	x	1 Tahun	1,600,000	15,900,000
5	Balohan	3 x	3,100,000	x	1 Tahun	9,300,000	16 x	1,000,000	x	1 Tahun	16,000,000	14 x	800,000	x	1 Tahun	11,200,000	36,500,000
6	Cot Abeuk	1 x	3,100,000	x	1 Tahun	3,100,000	14 x	1,000,000	x	1 Tahun	14,000,000	3 x	800,000	x	1 Tahun	2,400,000	19,500,000
7	Cot Ba'U	5 x	3,100,000	x	1 Tahun	15,500,000	41 x	1,000,000	x	1 Tahun	41,000,000	18 x	800,000	x	1 Tahun	14,400,000	70,900,000
8	Anoi Itam	3 x	3,100,000	x	1 Tahun	9,300,000	7 x	1,000,000	x	1 Tahun	7,000,000	10 x	800,000	x	1 Tahun	8,000,000	24,300,000
9	Ujong Kareung	0 x	3,100,000	x	1 Tahun	-	6 x	1,000,000	x	1 Tahun	6,000,000	2 x	800,000	x	1 Tahun	1,600,000	7,600,000
10	Iee Meulee	5 x	3,100,000	x	1 Tahun	15,500,000	21 x	1,000,000	x	1 Tahun	21,000,000	3 x	800,000	x	1 Tahun	2,400,000	38,900,000
JUMLAH		22	68,200,000				140	140,000,000				56	44,800,000				253,000,000
TOTAL		42	130,200,000				302	302,000,000				105	84,000,000				516,200,000

WALI KOTA SABANG,

ttd
 NAZARUDDIN

LAMPIRAN XIV
PERATURAN WALI KOTA SABANG
NOMOR 1 TAHUN 2020
TENTANG
TATA CARA PENGALOKASIAN DAN
PEMBAGIAN ALOKASI DANA GAMPONG
TAHUN ANGGARAN 2020

BESARAN ALOKASI DANA GAMPONG UNTUK UANG DUKA/KEMATIAN
DALAM KOTA SABANG

NO	GAMPONG	ALOKASI DANA	KETERANGAN
1	2	3	4
	Iboih	55,000,000	
	Batee Shok	60,000,000	
	Paya Seunara	100,000,000	
	Krueng Raya	65,000,000	
	Aneuk Laot	55,000,000	
	Kuta Timu	130,000,000	
	Kuta Barat	130,000,000	
	Kuta Ateuh	115,000,000	
	Paya	50,000,000	
	Keuneukai	80,000,000	
	Beurawang	45,000,000	
	Jaboi	50,000,000	
	Balohan	150,000,000	
	Cot Abeuk	50,000,000	
	Cot Ba'U	220,000,000	
	Ie Meulee	180,000,000	
	Ujong Kareung	60,000,000	
	Anoi Itam	50,000,000	
	JUMLAH	1,645,000,000	

WALI KOTA SABANG,

ttd

NAZARUDDIN

LAMPIRAN XV
 PERATURAN WALI KOTA SABANG
 NOMOR 1 TAHUN 2020
 TENTANG
 TATA CARA PENGALOKASIAN DAN
 PEMBAGIAN ALOKASI DANA GAMPONG
 TAHUN ANGGARAN 2020

BERDASARKAN ALOKASI DANA BANTUAN KEMATIAN/DUKA

ALOKASI DANA GAMPONG BANTUAN DANA KEMATIAN / DUKA		1,145,000,000
PEMBAGIAN DANA MERATA	60	687,000,000
PEMBAGIAN DANA PROPORSIONAL	40	458,000,000
JUMLAH GAMPONG		18

NO	KECAMATAN/ GAMPONG	ALOKASI DANA GAMPONG				KEPENDUDUKAN	
		ALOKASI MERATA	ALOKASI PROPORSIONAL	ALOKASI TOTAL	BOBOT PENDUDUK / GAMPONG	JUMLAH PENDUDUK	BOBOT
	SUKAKARYA						
1	IBOIH	38,166,667	14,059,658	52,226,325	0.031	1,272	0.031
2	BATEE SHOK	38,166,667	18,281,977	56,448,644	0.040	1,654	0.040
3	PAYA SEUNARA	38,166,667	32,562,699	70,729,366	0.071	2,946	0.071
4	KRUENG RAYA	38,166,667	22,625,881	60,792,548	0.049	2,047	0.049
5	ANEUK LAOT	38,166,667	14,501,786	52,668,453	0.032	1,312	0.032
6	KUTA TIMU	38,166,667	27,124,529	65,291,196	0.059	2,454	0.059
7	KUTA BARAT	38,166,667	43,748,528	81,915,195	0.096	3,958	0.096
8	KUTA ATEUH	38,166,667	47,992,953	86,159,620	0.105	4,342	0.105
	J U M L A H	305,333,333	220,898,011	526,231,345	0.482	19,985	
	SUKAJAYA						
1	PAYA	38,166,667	8,090,935	46,257,602	0.018	732	0.018
2	KEUNEUKAI	38,166,667	11,218,988	49,385,655	0.024	1,015	0.024
3	BEURAWANG	38,166,667	4,255,478	42,422,145	0.009	385	0.009
4	JABOI	38,166,667	9,439,425	47,606,091	0.021	854	0.021
5	BALOHAN	38,166,667	39,802,539	77,969,206	0.087	3,601	0.087
6	COT ABEUK	38,166,667	10,644,222	48,810,889	0.023	963	0.023
7	COT BA' U	38,166,667	84,302,684	122,469,350	0.184	7,627	0.184
8	ANOE ITAM	38,166,667	9,085,723	47,252,389	0.020	822	0.020
9	UJOENG KAREUNG	38,166,667	7,494,063	45,660,730	0.016	678	0.016
10	IE MEULEE	38,166,667	52,767,931	90,934,598	0.115	4,774	0.115
	J U M L A H	381,666,667	237,101,989	618,768,655	0.518	21,451	
	T O T A L	687,000,000	458,000,000	1,145,000,000	1.000	41,436.00	1.000

WALI KOTA SABANG,

ttd

NAZARUDDIN

LAMPIRAN XV
PERATURAN WALI KOTA SABANG
NOMOR 1 TAHUN 2020
TENTANG
TATA CARA PENGALOKASIAN DAN
PEMBAGIAN ALOKASI DANA GAMPONG
TAHUN ANGGARAN 2020

BESARAN JAMINAN SOSIAL KETENAGAKERJAAN
KEUCHIK, SEKRETARIS, KASI DAN KAUR

NO	URAIAN	SATUAN	BIAYA (Rp)	KETERANGAN
1	2	3	4	5
1	Keuchik	Orang/bulan	187,200	
2	Sekretaris	Orang/bulan	138,793	
3	Kasi	Orang/bulan	126,185	
4	Kaur	Orang/bulan	126,185	

WALI KOTA SABANG,

ttd

NAZARUDDIN

LAMPIRAN XVI
PERATURAN WALI KOTA SABANG
NOMOR 1 TAHUN 2020
TENTANG
TATA CARA PENGALOKASIAN DAN
PEMBAGIAN ALOKASI DANA GAMPONG
TAHUN ANGGARAN 2020

BESARAN DANA UNTUK LISTRIK
PADA MASING-MASING GAMPONG DALAM KOTA SABANG

NO	GAMPONG	ALOKASI DANA	KETERANGAN
1	2	3	4
1	Iboih	322,900,000	
2	Batee Shok	386,225,125	
3	Paya Seunara	659,629,000	
4	Krueng Raya	481,138,075	
5	Aneuk Laot	262,059,700	
6	Kuta Timu	489,332,950	
7	Kuta Barat	727,613,675	
8	Kuta Ateuh	644,231,975	
9	Paya	165,086,500	
10	Keuneukai	234,384,700	
11	Beurawang	120,077,725	
12	Jaboi	186,260,950	
13	Balohan	787,622,300	
14	Cot Abeuk	206,500,600	
15	Cot Ba'U	1,259,663,500	
16	Anoi Itam	196,420,750	
17	Ujong Kareung	161,236,600	
18	Iee Meulee	724,999,925	
	JUMLAH	8,015,384,050	

WALI KOTA SABANG,

ttd

NAZARUDDIN

LAMPIRAN XVII
PERATURAN WALI KOTA SABANG
NOMOR 1 TAHUN 2020
TENTANG
TATA CARA PENGALOKASIAN DAN
PEMBAGIAN ALOKASI DANA GAMPONG
TAHUN ANGGARAN 2020

BESARAN DANA UNTUK GAS
PADA MASING-MASING GAMPONG DALAM KOTA SABANG

NO	GAMPONG	ALOKASI DANA	KETERANGAN
1	2	3	4
1	Iboih	119,720,000	
2	Batee Shok	166,853,600	
3	Paya Seunara	282,875,400	
4	Krueng Raya	195,520,800	
5	Aneuk Laot	98,580,400	
6	Kuta Timu	200,801,600	
7	Kuta Barat	338,323,800	
8	Kuta Ateuh	166,099,200	
9	Paya	81,983,600	
10	Keuneukai	117,817,600	
11	Beurawang	54,070,800	
12	Jaboi	88,773,200	
13	Balohan	269,296,200	
14	Cot Abeuk	101,220,800	
15	Cot Ba'U	284,384,200	
16	Anoi Itam	92,545,200	
17	Ujong Kareung	68,781,600	
18	Iee Meulee	183,827,600	
	Jumlah	2,911,475,600	

WALI KOTA SABANG,

ttd

NAZARUDDIN

LAMPIRAN VIII
 PERATURAN WALI KOTA SABANG
 NOMOR 1 TAHUN 2020
 TENTANG
 TATA CARA PENGALOKASIAN DAN
 PEMBAGIAN ALOKASI DANA GAMPONG
 TAHUN ANGGARAN 2020

BESARAN INSENTIF KEPADA GURU SEUMUBET BA'DA MAGRIB
 PADA MESJID DAN MEUNASAH DALAM KOTA SABANG

NO	GAMPONG	GURU MENGAJI		JLH	HONORARIUM/ ORANG/BULAN	KETERANGAN
		MESJID	MENASAH			
1	2	3	4	5	6	7
1	Iboih	2	3	5	500,000	Honorarium dibayar selama 12 (dua belas) bulan
2	Batee Shok	2	5	7	500,000	
3	Paya Seunara	1	5	6	500,000	
4	Krueng Raya	1	5	6	500,000	
5	Aneuk Laot	1	4	5	500,000	
6	Kuta Timu	1	4	5	500,000	
7	Kuta Barat	1	2	3	500,000	
8	Kuta Ateuh	0	3	3	500,000	
9	Paya	0	3	3	500,000	
10	Keuneukai	1	2	3	500,000	
11	Beurawang	0	2	2	500,000	
12	Jaboi	1	1	2	500,000	
13	Balohan	2	5	7	500,000	
14	Cot Abeuk	1	2	3	500,000	
15	Cot Ba'U	3	5	8	500,000	
16	Anoi Itam	1	2	3	500,000	
17	Ujong Kareung	1	-	1	500,000	
18	Iee Meulee	1	7	8	500,000	
	JUMLAH	20	60	80	9,000,000	

WALI KOTA SABANG,

ttd

NAZARUDDIN

LAMPIRAN XVI
 PERATURAN WALI KOTA SABANG
 NOMOR 1 TAHUN 2020
 TENTANG
 TATA CARA PENGALOKASIAN DAN
 PEMBAGIAN ALOKASI DANA GAMPONG
 TAHUN ANGGARAN 2020

BESARAN INSENTIF KEPADA GURU SEUMUBET BA'DA MAGRIB
 PADA MESJID DAN MEUNASAH DALAM KOTA SABANG

NO	GAMPONG	GURU MENGAJI		JLH	JERIH/ORG (Rp)	JERIH/BLN (Rp)	JERIH/THN (Rp)
		MESJID	MSH				
1	2	3	4			5	
1	Iboih	2	3	5	500,000	2,500,000	30,000,000
2	Batee Shok	2	5	7	500,000	3,500,000	42,000,000
3	Paya Seunara	1	5	6	500,000	3,000,000	36,000,000
4	Krueng Raya	1	5	6	500,000	3,000,000	36,000,000
5	Aneuk Laot	1	4	5	500,000	2,500,000	30,000,000
6	Kuta Timu	1	4	5	500,000	2,500,000	30,000,000
7	Kuta Barat	1	2	3	500,000	1,500,000	18,000,000
8	Kuta Ateuh	0	3	3	500,000	1,500,000	18,000,000
9	Paya	0	3	3	500,000	1,500,000	18,000,000
10	Keuneukai	1	2	3	500,000	1,500,000	18,000,000
11	Beurawang	0	2	2	500,000	1,000,000	12,000,000
12	Jaboi	1	1	2	500,000	1,000,000	12,000,000
13	Balohan	2	5	7	500,000	3,500,000	42,000,000
14	Cot Abeuk	1	2	3	500,000	1,500,000	18,000,000
15	Cot Ba'U	3	5	8	500,000	4,000,000	48,000,000
16	Anoi Itam	1	2	3	500,000	1,500,000	18,000,000
17	Ujong Kareung	1	-	1	500,000	500,000	6,000,000
18	Iee Meulee	1	7	8	500,000	4,000,000	48,000,000
	JUMLAH	20	60	80	9,000,000	40,000,000	480,000,000

WALI KOTA SABANG,

ttd

NAZARUDDIN

LAMPIRAN IX
PERATURAN WALI KOTA SABANG
NOMOR 1 TAHUN 2020
TENTANG
TATA CARA PENGALOKASIAN DAN
PEMBAGIAN ALOKASI DANA GAMPONG
TAHUN ANGGARAN 2020

BESARAN TAGIHAN REKENING LISTRIK
UNTUK PENERANGAN JALAN UMUM (PJU) DALAM KOTA SABANG

NO	GAMPONG	KWH	TARIF/ KWH (Rp)	BIAYA TAGIHAN/BULAN (Rp)	BIAYA TAGIHAN (5 bulan) (Rp)
1	2	3	4	5	6
1	Iboih	12,516	1,467	18,379,476	91,897,382
2	Batee Shok	12,422	1,467	18,241,552	91,207,761
3	Paya Seunara	20,672	1,467	30,346,612	151,733,061
4	Krueng Raya	13,969	1,467	20,511,434	102,557,172
5	Aneuk Laot	12,656	1,467	18,584,896	92,924,478
6	Kuta Timu	8,297	1,467	12,189,022	60,945,111
7	Kuta Barat	23,766	1,467	34,886,376	174,431,882
8	Kuta Ateuh	23,813	1,467	34,955,339	174,776,693
9	Paya	8,438	1,467	12,395,909	61,979,543
10	Keuneukai	10,313	1,467	15,147,059	75,735,293
11	Beurawang	4,219	1,467	6,205,454	31,027,272
12	Jaboi	8,531	1,467	12,532,366	62,661,828
13	Balohan	23,531	1,467	34,541,566	172,707,828
14	Cot Abeuk	9,047	1,467	13,289,482	66,447,411
15	Cot Ba'U	52,688	1,467	77,323,049	386,615,243
16	Anoi Itam	10,875	1,467	15,971,670	79,858,350
17	Ujong Kareung	10,734	1,467	15,764,784	78,823,918
18	Iee Meulee	36,047	1,467	52,906,042	264,530,211
	JUMLAH	302,534		444,172,088	2,220,860,438

WALI KOTA SABANG,

ttd

NAZARUDDIN

LAMPIRAN XVII
 PERATURAN WALI KOTA SABANG
 NOMOR 1 TAHUN 2019
 TENTANG
 TATA CARA PENGALOKASIAN DAN
 PEMBAGIAN ALOKASI DANA GAMPONG
 TAHUN ANGGARAN 2020

BESARAN TAGIHAN REKENING LISTRIK
 UNTUK PENERANGAN JALAN UMUM (PJU) DALAM KOTA SABANG

NO	GAMPONG	KWH	TARIF/ KWH (Rp)	BIAYA TAGIHAN/BULAN (Rp)	BIAYA TAGIHAN/TAHUN (Rp)	DESA (5Bulan) (Rp)	DESA 40%	PEMKO (7BLN) (Rp)	PEMKO 60%
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Iboih	12,516	1,467.28	18,364,476.48	220,373,717.76	91,822,382.40	88,149,487.10	128,551,335.36	132,224,230.66
2	Batee Shok	12,422	1,467.28	18,226,552.16	218,718,625.92	91,132,760.80	87,487,450.37	127,585,865.12	131,231,175.55
3	Paya Seunara	20,672	1,467.28	30,331,612.16	363,979,345.92	151,658,060.80	145,591,738.37	212,321,285.12	218,387,607.55
4	Krueng Raya	13,969	1,467.28	20,496,434.32	245,957,211.84	102,482,171.60	98,382,884.74	143,475,040.24	147,574,327.10
5	Aneuk Laot	12,656	1,467.28	18,569,895.68	222,838,748.16	92,849,478.40	89,135,499.26	129,989,269.76	133,703,248.90
6	Kuta Timu	8,297	1,467.28	12,174,022.16	146,088,265.92	60,870,110.80	58,435,306.37	85,218,155.12	87,652,959.55
7	Kuta Barat	23,766	1,467.28	34,871,376.48	418,456,517.76	174,356,882.40	167,382,607.10	244,099,635.36	251,073,910.66
8	Kuta Ateuh	23,813	1,467.28	34,940,338.64	419,284,063.68	174,701,693.20	167,713,625.47	244,582,370.48	251,570,438.21
9	Paya	8,438	1,467.28	12,380,908.64	148,570,903.68	61,904,543.20	59,428,361.47	86,666,360.48	89,142,542.21
10	Keuneukai	10,313	1,467.28	15,132,058.64	181,584,703.68	75,660,293.20	72,633,881.47	105,924,410.48	108,950,822.21
11	Beurawang	4,219	1,467.28	6,190,454.32	74,285,451.84	30,952,271.60	29,714,180.74	43,333,180.24	44,571,271.10
12	Jaboi	8,531	1,467.28	12,517,365.68	150,208,388.16	62,586,828.40	60,083,355.26	87,621,559.76	90,125,032.90
13	Balohan	23,531	1,467.28	34,526,565.68	414,318,788.16	172,632,828.40	165,727,515.26	241,685,959.76	248,591,272.90
14	Cot Abeuk	9,047	1,467.28	13,274,482.16	159,293,785.92	66,372,410.80	63,717,514.37	92,921,375.12	95,576,271.55
15	Cot Ba'U	52,688	1,467.28	77,308,048.64	927,696,583.68	386,540,243.20	371,078,633.47	541,156,340.48	556,617,950.21
16	Anoi Itam	10,875	1,467.28	15,956,670.00	191,480,040.00	79,783,350.00	76,592,016.00	111,696,690.00	114,888,024.00
17	Ujong Kareung	10,734	1,467.28	15,749,783.52	188,997,402.24	78,748,917.60	75,598,960.90	110,248,484.64	113,398,441.34
18	Iee Meulee	36,047	1,467.28	52,891,042.16	634,692,505.92	264,455,210.80	253,877,002.37	370,237,295.12	380,815,503.55
	JUMLAH	302,534		443,902,087.52	5,326,825,050.24	2,219,510,437.60	2,130,730,020.10	3,107,314,612.64	3,196,095,030.14

WALIKOTA SABANG,

ttd

NAZARUDDIN

